

**STRATEGI PENCEGAHAN POLIS *LAPSE* AKIBAT
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Study Pada PT Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Ridho Febriyansyah

Npm: 1651020485

Prodi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**

**STRATEGI PENCEGAHAN POLIS *LAPSE* AKIBAT
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Study Pada PT Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Ridho Febriyansyah

Npm: 1651020485

Prodi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Budimansyah, S.Th.I, M. Kom, I.

Pembimbing II: Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Di Indonesia sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mengikuti asuransi dikarenakan tingginya kesadaran perlindungan risiko. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan syariah berasal dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan polis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi. Namun pada praktiknya, adanya nasabah yang merasa dirugikan akibat terjadinya polis *lapse* karena jika nasabah mengalami polis *lapse* akibatnya jika hendak mengajukan klaim maka klaim akan ditolak oleh perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan di asuransi Prudential syariah Bandar Lampung dan juga untuk mengetahui strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*) selain itu sebagai pelengkap penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dan juga dilengkapi data sekunder. Analisis data tersebut dianalisis menggunakan data yang bersifat kualitatif, dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya yang bersifat umum.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa polis *lapse* akan dinyatakan *lapse* ketika nasabah tidak membayarkan preminya sampai tanggal jatuh tempo dan batas keterlambatan yang telah diberikan. Sehingga, untuk mencegah terjadinya polis *lapse* yaitu dengan memberlakukan upaya strategi pencegahan risiko terjadinya dengan pembayaran melalui *internet banking*, *auto debet*, *virtual account*, pemotongan *tabarru'* secara otomatis tujuannya untuk memudahkan nasabah untuk membayar premi secara rutin dan tepat waktu dimanapun dan kapanpun.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Polis *Lapse*, Premi

ABSTRACT

In Indonesia, some people take steps to take insurance because of the high awareness of risk protection. Sharia insurance is a risk management arrangement that complies with sharia provisions for mutual assistance involving participants and sharia companies originating from the provisions of the Qur'an and Hadith. While the lapse policy is the termination of insurance coverage due to non-payment of premiums. However in, practice, there are customers who feel aggrieved due to the occurrence of policy lapse because if the customer experiences a policy lapse as a result, if they want to file a claim will be rejected by the company.

The purpose of this study is to determine the strategy for preventing policy lapse due to delays in payment of advanced premiums in Prudential sharia insurance in Bandar Lampung and also to determine strategies to prevent policy lapse due to delays in payment of advanced premiums in an Islamic perspective. In addition, as a complement to the research, this research uses library research. Primary data is obtained directly from the source, either through interviews, observations and reports and is also equipped with secondary data. The data analysis was analyzed using qualitative data, by means of inductive thinking, namely departing from facts or events that were specifically drawn to generalizations of a general nature.

Based on the results of the study, it can be concluded that the lapse policy will be declared lapse when the customer does not pay the premium until the due date and delay limit that has been given. Thus, to prevent the occurrence of policy lapse, payments via internet banking, auto debit, virtual accounts, automatically cutting tabarru', the aim is to make it easier for customers to pay premiums regularly and on time wherever and whenever.

Keywords: *Prevention Strategy, Lapse Policy, Premi*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Banda Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ridho Febriyansyah
NPM : 1651020485
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pencegahan Polis Lapse Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Islam (Study Pada Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung,
Penulis,



Ridho Febriyansyah
NPM. 1651020485



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Banda Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Polis Lapse Akibat
Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan
Dalam Perspektif Islam (Study Pada Asuransi
Prudential Syariah Bandar Lampung)**
Nama : Ridho Febriyansyah
NPM : 1651020485
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bydimansyah, M.Kom.I

Ahmad Hazas Syarif, M.E.I

NIP.19770725200212100

NIP. 198809292019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Eriko Anggraeni, M.E.Sy.

NIP.19820808720112009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Banda Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pencegahan Polis Lapse Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Islam (Study Pada Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung)” disusun oleh Ridho Febriyansyah, NPM: 1651020485, Program studi Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Nasruddin, M. Ag.

Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

Penguji I : Dr. Erike Anggraeni, M.E, Sy.

Penguji II : Dr. Budimansyah, M. Kom. I

Penguji III : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NPM: 19008012003121001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.

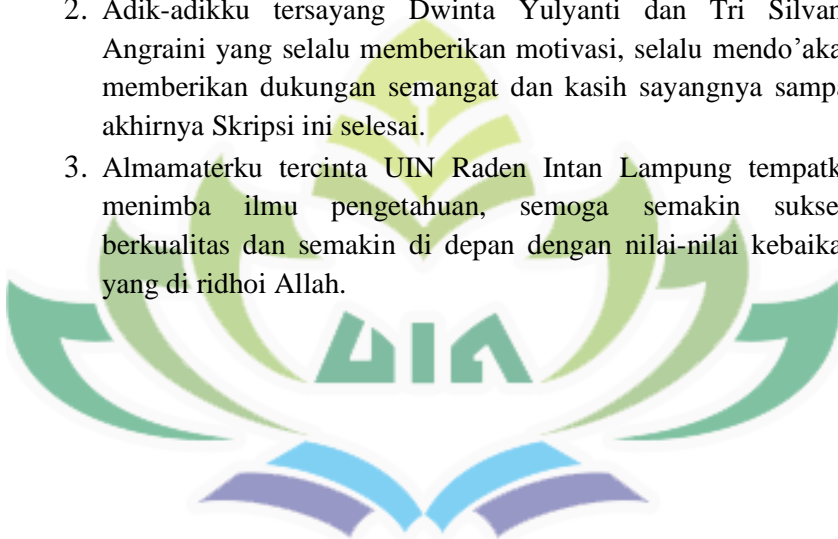
“(QS. Al-Maidah: (5): 2)”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pemberi segalanya berupa kebaikan. Dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, ayahandaku Hermansyah dan ibundaku Yuhana yang selalu mencintaiku dengan sempurna, dan, tiada hentinya selalu mendo'akanku, memperhatikanku, memotivasiku berjuang dan membesarkan serta senantiasa mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untukku.
2. Adik-adikku tersayang Dwinta Yulyanti dan Tri Silvana Angraini yang selalu memberikan motivasi, selalu mendo'akan memberikan dukungan semangat dan kasih sayangnya sampai akhirnya Skripsi ini selesai.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan, semoga semakin sukses, berkualitas dan semakin di depan dengan nilai-nilai kebaikan yang di ridhoi Allah.



RIWAYATHIDUP

Ridho Febriyansyah, lahir di Kotaagung, Tanggamus 15 February 1998 anak kesatu dari tiga bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan bapak Hermansyah dan Ibu Yuhana.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 3 Kuripan Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2013
3. SMANegeri 2 Kotaagung Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada tahun 2016 mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bandar Lampung, 4 Mei 2021

Ridho Febriyansyah
NPM.1651020485

KATAPENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim diseluruh dunia. Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul : “Strategi Pencegahan Polis *Lapse* Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Islam” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Dr. Budimansyah, S.Th.I, M. Kom, I. Dan Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II

yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, memberikan ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dan bantuannya dengan sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Pemilik dan Karyawan PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku tempatku berbagi dan selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, Angga, Rika, Acory, Riki, Dani, Oka, Jupen, Hammam, Hendri, Nanda, Yobi, Youri, Nugroho, Rizky, Thalba, Maman serta masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi suka duka, kebahagiaan kesusahaan semangat pantang menyerah dan dukungan hebatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman seperjuanganku PS.G angkatan 2016 dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Teman KKN kelompok 187 Desa Pagar Alam, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, terimakasih atas segala bentuk bantuan kalian dan motivasinya selama ini. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca dan umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 4 Mei 2021
Penulis,

Ridho Febriyansyah
NPM. 1651020485



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	17
G. Tinjauan Pustaka	17
H. Metode Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi Pencegahan	31
1. Pengertian Strategi	31
2. Pengertian Strategi Pencegahan	32
B. Asuransi dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian Asuransi Syariah	32
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	34
3. Prinsip Asuransi Syariah	37
4. Akad Tijari dan Akad Tabarru'	39
C. Polis Asuransi	46
D. Premi Asuransi	51

E. Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi	56
F. Manajemen Risiko Asuransi.....	57
G. Tolong-Menolong Dalam Islam.....	62

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Prudential Syariah Bandar Lampung..	67
1. Sejarah Asuransi PT. Prudential Life Assurance	67
2. Visi dan Misi PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung	69
3. Struktur Organisasi Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung	70
4. Produk-Produk Asuransi Syariah Prudential Bandar Lampung	71
B. Faktor Penyebab Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.....	76
1. Faktor Internal	76
2. Faktor Eksternal	77
C. Strategi Pencegahan Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan dalam Perspektif Islam Pada Asuransi Prudential Bandar Lampung.....	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi Pencegahan Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.....	87
B. Strategi Pencegahan Polis <i>Lapse</i> Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Islam.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Keterangan Polis Lapse Menurut Tahun 2017-2020
di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung15
2. Data Jumlah Polis Terdaftar di Asuransi Prudential Syariah
Bandar Lampung.....70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Hasil Penelitian

Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan dan arti makna dari berbagai istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap penekanan judul dari berbagai istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“STRATEGI PENCEGAHAN POLIS LAPSE AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Study pada PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pencegahan

Istilah strategi dalam bahasa inggris yaitu *strategy*, yang berarti siasat taktik atau cara. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan perusahaan.¹ Pencegahan ialah suatu hal yang dicegah, atau proses untuk mencegah. Dalam penelitian skripsi ini, strategi pencegahan yang dimaksud adalah suatu cara atau taktik yang dilakukan pada PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung guna mencegah terjadinya polis *lapse*. Di PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mempermudah pembayaran premi oleh pemegang polis serta dapat menghindari terjadinya polis *lapse*.

¹Husein Umar, *Strategi Manajemen In Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 21.

2. Polis *Lapse*

Polis adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis juga dapat diartikan surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat asuransi, ditandatangani penanggung dan pemegang polis. *Lapse* artinya pembatalan atau penghentian masa efektif polis karena premi tidak dibayar setelah melewati masa tenggang. Jadi polis *lapse* adalah pemberhentian sementara atas pertanggungan asuransi akibat tidak adanya pembayaran premi-premi. Polis akan aktif kembali apabila peserta telah melakukan pembayaran atas premi yang tertunggak.²

3. Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung risiko mempunyai ketentuan masing-masing dalam menetapkan waktu jatuh tempo pembayaran premi dan kelonggaran waktu keterlambatan pembayaran premi, salah satu faktor klaim ditolak oleh pihak penanggung adalah sering terlambat melakukan pembayaran premi yang seharusnya dibayarkan tepat waktu secara rutin.³ Pada penjelasan ini, Akibat keterlambatan pembayaran yang dimaksud adalah keterlambatan membayar premi dapat dilihat dari tanggal jatuh tempo nasabah, apabila nasabah membayar premi lewat dari jangka waktu 1 bulan maka secara otomatis polis asuransi akan dibatalkan (*lapse*). Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.

²Mendapatkan Kredit, Pada Perusahaan, and Abdul Tayib, "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi," *Unizar Law Review* 2, no. 1 (2019).

³Dwi Novita Anggraini and M.Ak Ova Novi Irama, SE, "Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Cabang Kesawan," *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 1, no. 1 (2019): 31–40, <http://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/JA API/article/view/302>.

4. Premi Lanjutan

Premi yaitu sejumlah pembayaran yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Premi merupakan kemampuan dari seorang penanggung untuk membayar ganti rugi dan pembayaran premi tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Premi ada dua jenis yaitu premi yang dibayarkan hanya satu kali, dan ada premi lanjutan. Premi lanjutan adalah premi yang dibayarkan lebih dari satu kali. Mengenai adanya premi lanjutan tersebut tergantung pada produk yang dipilih dan dibutuhkan peserta.⁴ Maksud dari penjelasan ini, adalah premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi baik penanggung maupun tertanggung, untuk peserta/tertanggung sendiri adalah untuk mendapatkan jaminan perlindungan risiko buruk yang bisa dialami kapanpun. Perlindungan ini kemudian diperoleh dengan cara membayar premi asuransi yang sekaligus agar mendapatkan manfaat asuransi tersebut.

5. Perspektif Islam

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jadi, perspektif Islam artinya cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu berdasarkan syariat Islam.⁵ Maksud dari penjelasan ini, adalah cara pandang pengetahuan pada seorang individu dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan yang harus sesuai dengan ajaran hukum Islam yang berlaku.

⁴Ineke Vanessa Priscilia and Universitas Narotama Surabaya, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Uupkdrt Serta Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (n.d.): 153–162.

⁵Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

6. PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung

Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung terletak di kawasan yang sangat strategis yaitu di kawasan Jl. Sudirman NO.68b, Rawa Laut Enggal Bandar Lampung. Kawasan tersebut menghubungkan berbagai jalanan di kota Bandar Lampung karena lokasi dapat di akses dengan mudah oleh nasabah maupun calon nasabah. Maksud dan tujuan dari perusahaan asuransi jiwa dan jasa keuangan ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan keluarga di masa yang akan datang, dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi risiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih.

Berdasarkan istilah-istilah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan secara lebih akurat dan kritis mengenai strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam pada Asuransi Prudential Bandar Lampung. Sehingga, strategi pencegahan polis *lapse* yang terjadi tepat sasaran dan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan sudut pandang objektif dan subjektif pemilihan judul penelitian dikarenakan berbagai alasan yaitu:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dalam penelitian ini, karena banyaknya badan asuransi yang ada menetapkan peraturan mengenai prosedur polis *lapse* secara sepihak. Sehingga menyebabkan banyak pengguna asuransi syariah yang merasa dirugikan jika mengalami polis *lapse* pada asuransinya. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan awal perjanjian mengenai pengembalian uang premi kepada nasabah. Ketika nasabah

mengalami polis *lapse* pihak asuransi memberikan keputusan secara sepihak sehingga uang nasabah pun tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang dibahas ini sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Lampung.
- b. Dari aspek yang akan dibahas dalam permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai strategi pencegahan yang diterapkan dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya polis *lapse* pada sebuah kontrak polis asuransi antara penanggung dan tertanggung, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia. Serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika di Indonesia banyak berdiri lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank. Asuransi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah non bank. Berdiri dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia tidak hanya diminati oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga non Islam. Hal ini memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan dari praktik asuransi syariah sendiri sebagai salah satu alat pendorong dan penggerak perekonomian di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam asuransi dikenal dengan istilah

takaful yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.⁶

Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Pada perusahaan asuransi syariah (*ta'amin, takaful, atau tadhamum*), hubungan kerjasama antara kedua belah pihak akan terjadi jika transaksi dilakukan berdasarkan akad *mudharabah*, yang bertujuan untuk melindungi tertanggung dari resiko keuangan masa depan yang tidak terduga.⁷

Peranan perusahaan hanya sebagai pengelola dan dibayarkan oleh nasabah asuransi syariah dalam bentuk premi asuransi syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, dan pengelola dana sebagai *mudharib*, sedangkan pemegang polis premi asuransi sebagai peserta polis asuransi syariah atau *shahibul maal* merupakan pemilik dana sepenuhnya. Perusahaan melakukan bisnis dengan tujuan agar tercapai laba atau *profit* yang maksimal, apabila perusahaan telah membuat sebuah produk dengan nilai yang bersaing di pasaran. Kemudian membuat sebuah strategi pemasaran yang tepat dengan melakukan segmentasi pasar, diharapkan pada akhirnya produk tersebut memberikan sumbangan besar dalam perolehan laba akhir tahun perusahaan asuransi syariah.⁸

Fenomena perkembangan asuransi syariah, menimbulkan pertanyaan mengenai keunggulan dari produk asuransi

⁶Mei Santi, "Penerapan Asuransi Syariah Unit Link Di Indonesia," 3 *Eksyar* 5, no. 1 (2018): 28–39.

⁷Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah," *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 27.

⁸Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

syariah. Karena itulah dalam produk asuransi syariah tidak dikenal dengan adanya *risk transfer* (transfer resiko) melainkan dikenal dengan nama *risk sharing* (berbagi resiko). *Risk sharing* (berbagi resiko) merupakan tindakan saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi syariah untuk membagi resiko yang akan dihadapi bersama dengan mengumpulkan sejumlah premi dengan adanya dana *tabarru'* didalamnya. Sedangkan *risk transfer* (transfer resiko) adalah sejumlah premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi konvensional sebagai kompensasi atas pengalihan resiko kepadanya. Apabila terjadi klaim dari peserta maka asuransi konvensional membayar sejumlah uang pertanggungan, namun apabila peserta asuransi tidak mengajukan klaim maka dana premi tersebut hangus. Jadi premi tersebut sejak awal telah diakui oleh perusahaan asuransi konvensional sebagai milik perusahaan.⁹

Allah SWT dalam Al-Qur'an sudah memberikan perintah kepada umatnya untuk selalu bersiap dimasa depan. Bentuk persiapannya sendiri salah satunya adalah dengan menabung dan mendaftar asuransi. Asuransi sendiri merupakan alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam ekonomi dengan sistem kerja sama timbal balik. Singkatnya, asuransi merupakan alat untuk membantu masyarakat ketika mengalami musibah dan konsekuensi finansialnya yang memerlukan santunan. Hal ini sesuai firman Allah SWT berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁹Herry Ramadhani, “Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Al-Tijary* 1, no. 1 (2015): 57–66.

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya” (QS. Al-Maidah:2).*¹⁰

Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Jadi, dapat disimpulkan asuransi syariah ialah suatu bentuk kerja sama oleh orang-orang untuk saling tolong-menolong guna meminimalkan resiko yang akan terjadi, baik itu resiko kematian, resiko kesehatan, resiko kecelakaan yang dilakukan sesuai syariah Islam dengan tidak adanya unsur *maysir, gharar, dan riba*.¹¹

Pada praktik asuransi syariah terdapat perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau anggota asuransi. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang telah legal, dimana didalamnya terdapat penjelasan kondisi dan istilah yang patut dilindungi beserta pembayaran dana premi. Polis asuransi adalah bentuk bukti tertulis atas pembayaran premi untuk menutup pertanggungan resiko yang secara tegas dituliskan dalam kontrak.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa polis asuransi adalah suatu bukti tertulis yang menjadi dasar perikatan dalam asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung dalam sebuah akta tertulis berkaitan dengan format polis, tampaknya POJK mengadopsi apa yang sudah diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 1992. Mengacu pada beberapa peraturan sebagaimana yang telah diuraikan, maka polis wajib diterbitkan sebagai perjanjian

¹⁰ Departemen Agama *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2012).

¹¹ *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, n.d.

¹² Mei Triana, “Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt. Asuransi Raya Cabang Medan,” *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 1–18.

tertulis yang memuat hak dan kewajiban baik perusahaan asuransi maupun pemegang polis.

Asuransi Prudential (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995, merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa terdepan di Indonesia dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa. Sejak meluncurkan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Prudential Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Hingga 31 Desember 2018 Prudential memiliki 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Batam, serta 404 Kantor Pemasar Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 tenaga pemasar berlisensi.

Premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena masa perjanjian semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian maka, semakin besar pula *tabarru'*-nya. Premi lanjutan ialah premi yang dibayarkan lebih dari satu kali. Mengenai adanya premi lanjutan tersebut tergantung pada produk yang dipilih dan dibutuhkan oleh peserta. Dengan selalu dibayarkannya premi maka polis akan selalu aktif dan tidak terjadi *lapse*. Polis yang formalitasnya diatur dalam undang-undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian asuransi, baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan

perjanjian.¹³ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan. Perjanjian asuransi akta otentik dengan polis, dimana dapat diketahui bahwa polis merupakan alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.¹⁴

Ketentuan dalam PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia) Pasal 2 Tentang Pembayaran Premi yaitu bahwa setiap premi terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya diterima oleh pihak penanggung. Maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. Apabila premi yang dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.¹⁵

Polis asuransi dengan cara pembayaran premi lanjutan secara bulanan rentan mengalami *lapse*, sebab pemegang polis pihak yang membayarkan polis sering lupa, sibuk atau kesulitan keuangan. *Lapse* artinya pembatalan atau penghentian masa efektif polis karena premi tidak dibayar setelah melewati masa tenggang.¹⁶ Jadi, polis *lapse* adalah pemberhentian sementara atas pertanggungan asuransi akibat tidak dibayarkannya premi-premi.

¹³ Nurul Hidayati Nasution and Satria Tri Nanda, "PENGARUH PENDAPATAN PREMI , HASIL UNDERWRITING ,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 41–55.

¹⁴ Ella Patriana, "Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Syariah Dalam Hubungannya Dengan Segmentasi Pasar Dan Laba Perusahaan,” *Ekonomi* 13, no. 2 (2015): 176–189.

¹⁵ <https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=psaki+tentan+g+pembayaran+premi&p2> di akses pada tanggal 3 July 2021.

¹⁶ Liana Gunawan Wilatikta, "Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa,” *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2015): 54–67.

Adapun standar penentuan atau kriteria batas keterlambatan pembayaran premi lanjutan dikatakan menjadi polis *lapse* yaitu :

1. apabila dalam 1 tahun pertama premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Contoh, tertanggung sudah menunggak selama 3 bulan premi di tahun pertama, maka akan hilang dan premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Terkecuali apabila tertanggung sudah 3 atau 4 tahun ada nilai tunainya. Apabila tertanggung tersebut sudah membayar dalam 4 tahun preminya, kemudian di tahun ke 5 tertanggung tidak membayar premi sebagaimana ketentuan yang tertera dalam polis maka tertanggung akan mendapatkan hasil investasi yang terbentuk di tahun ke 4 tersebut.
2. Penyebabnya karena nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya polis. Setelah polis berusia 2 tahun biaya-biaya polis (biaya akuisisi yang masih tersisa, biaya asuransi dan administrasi) akan langsung dipotong dari nilai investasi, tanpa melihat apakah nasabah telah menyetor premi atau tidak.¹⁷
3. Dalam 2 tahun pertama, nasabah harus membayar premi sebelum melewati masa tenggang/jatuh tempo pembayaran yang lamanya berkisar 30-45 hari. Jika sudah melewati ketentuan tersebut, maka status polis menjadi tidak aktif.

Akibat adanya keterlambatan pembayaran premi lanjutan peserta yang polisnya keadaan *lapse*, dan jika peserta tersebut mengalami musibah dan hendak mengajukan klaim maka klaimnya akan ditolak karena tidak berlakunya polis. PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung tak luput dari masalah polis *lapse* yang terjadi akibat adanya keterlambatan pembayaran premi lanjutan yang dilakukan oleh peserta asuransi. Keterlambatan yang dimaksud adalah apabila nasabah tidak membayarkan preminya sampai batas waktu

¹⁷Gibran et al, “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa,” *Pactum Law journal* 2, no. 02 (2019): 606–618.

keterlambatan yang diberikan yaitu 30-45 hari. Jika terjadi *lapse*, yang jelas nasabah yang rugi, sebab jika kurang dari 1 tahun, uang preminya hangus. Penyebab terjadinya polis *lapse* ini terutama berasal dari over-acting nya salesman.¹⁸ Di Indonesia banyak pemegang polis bukan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, tetapi karena kepintaran agen mempromosikan jasa itu dengan janji yang menggiurkan.

Perlu kamu ketahui rata-rata setiap perusahaan asuransi biasanya memiliki aturan yang berbeda terkait pemulihan polis asuransi. Ada beberapa perusahaan yang memang mengharuskan nasabah yang kondisi polis asuransinya *lapse* harus menjalani pemeriksaan kesehatan ulang. Apabila, saat dalam kondisi *lapse* nasabah mengalami sakit, oleh karena itu, kamu juga perlu memastikan hal ini pada agen asuransi terkait. Polis *lapse* ini diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 2 tahun. Sebenarnya jika diperhatikan kondisi polis *lapse* ini akan sangat merugikan nasabah. Pasalnya, saat nasabah membutuhkan klaim dalam kondisi sakit dan tidak bisa membayar biaya perawatan asuransi yang dibutuhkan justru tidak aktif. Sementara, untuk mengaktifkan kembali polis *lapse* ini harus membayar biaya tunggakan yang lama tak dibayarkan belum biaya administrasi lainnya.¹⁹

Upaya tindakan strategi pencegahan dilakukan ketika nasabah terlambat dalam pembayaran premi tiap bulannya, namun dana investasinya masih mencukupi untuk membayar besarnya biaya premi. Pihak asuransi syariah menerapkan strategi pencegahan untuk mengurangi polis *lapse* dengan mengambil dana investasi untuk menutupi kekurangan pembiayaan biaya kontribusi atau premi, sehingga dengan begitu dapat mengurangi banyaknya risiko polis *lapse* yang

¹⁸Anggraini and Ova Novi Irama, SE, “Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Cabang Kesawan.”

¹⁹Neneng Sri Setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi,” *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 150.

terjadi. Karena ketika nasabah lalai dalam pembayaran premi tiap jatuh tempo ditutup dengan biaya investasi yang masih mencukupi untuk membayarnya maka, nasabah akan terhindar dari polis *lapse* tersebut. Namun, setelah biaya investasinya tidak mencukupi untuk membayar biaya premi, maka polis tersebut dikatakan *lapse* atau tidak aktif.²⁰

Strategi pencegahan polis *lapse* yang dilakukan dengan cara jalan yang terbaik untuk menjaga polis agar tidak *lapse* adalah membayar premi asuransi kamu setiap tanggal jatuh tempo dengan disiplin dan tepat waktu. Meskipun ini merupakan hal yang sepele namun bisa mencegahmu dari polis *lapse* yang justru akan merugikan nasabah. Apabila dihitung, biaya premi asuransi yang dibayarkan tepat waktu setiap bulan dibandingkan dengan tunggakan asuransi yang harus dibayarkan saat polis *lapse*, maka justru lebih ringan ketika premi asuransi dibayarkan dengan rutin setiap bulan.²¹

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, setiap perusahaan asuransi syariah sudah semestinya memiliki manajemen dan strategi tersendiri untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah lama maupun nasabah baru. Melihat begitu pentingnya polis asuransi dalam suatu perusahaan membuat setiap lini dalam perusahaan tersebut selalu mencari apa saja strategi yang nantinya diterapkan di perusahaan bersangkutan.²² Salah satu upaya strategi pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya polis *lapse* antara lain:

1. Sistem keluhan dan saran, artinya setiap perusahaan asuransi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para nasabahnya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka.

²⁰S Burhanuddin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia" (2013): 97–106.

²¹Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2007).

²² Hendrianto and Riska Misdalepa, Strategi Marketing Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah, *Jurnal Al-Qasd 1*, no. 2 (2017): 127-142.

2. Memberikan tanda positif dengan cara memberikan perhatian kepada nasabahnya untuk mengingatkan pentingnya melakukan pembayaran premi sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Sebagai atribut layanan nasabah, yaitu bahwa penyampaian jasa pelayanan harus tepat waktu, akurat dengan perhatian dan keramahan.
4. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepuasan nasabah. Ini disebabkan oleh faktor biaya, waktu penerapan program dan pengaruh pelayanan nasabah.
5. Empati terhadap nasabah meliputi kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para nasabahnya.
6. Menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah, serta mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko terjadinya polis *lapse* pada asuransi syariah.²³

Terciptanya kepuasan nasabah memberikan manfaat akan keberhasilan suatu perusahaan asuransi. Perusahaan akan mengukur kepuasan nasabah secara teratur. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menciptakan nasabah yang aktif dalam melakukan pembayaran premi sebelum tanggal jatuh tempo adalah dengan memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik kepada nasabah sehingga antara kebijakan pelayanan suatu perusahaan dengan keinginan dan harapan nasabah, tidak memiliki kesenjangan.

Asuransi Prudential syariah Bandar Lampung menerapkan adanya strategi pencegahan guna menghindari terjadinya polis *lapse*, diantaranya dengan pembayaran premi lanjutan dengan cara pembayaran premi dengan metode *internet banking*, *virtual account*, *auto debet*, dan pemotongan

23 Yunita Hasrina, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di PT. Jasa Raharja KPJR Pangkalan Balai", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, No. 3 (2018): 133-141.

dana *tabarru'* otomatis yang bertujuan untuk mempermudah peserta yang memiliki kesibukan padat namun tetap dapat membayar premi tepat waktu dan mudah dilakukan dimana dan kapanpun. Hal ini bertujuan mengurangi terjadinya polis *lapse* terutama pada nasabah asuransi Prudential syariah Bandar Lampung yang sering lupa, sibuk, dan bahkan sedang mengalami kesulitan keuangan.²⁴ Berikut ini penulis paparkan data polis *lapse* berdasarkan cara pembayarannya di PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung periode 2017-2020.

Tabel 1
Data Polis *Lapse* Berdasarkan Cara Pembayaran Tahun
2017-2020

No	Tahun	Premi (Bulan)	Premi (Tahun)	Polis <i>Lapse</i>
1	2017	Rp. 3.600.000	Rp. 32.200.000	14
2	2018	Rp. 7.300.000	Rp. 81.500.000	35
3	2019	Rp. 6.200.000	Rp. 58.700.000	20
4	2020	Rp. 5.520.000	Rp. 16.350.000	18
	Jumlah	Rp. 22.620.000	Rp. 188.750.000	87

Sumber: Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah polis *lapse* yang terjadi di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung selama kurun waktu 2017-2020 sebanyak 87 polis.

²⁴Wawancara dengan Pegawai Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung, Tanggal 17 November 2020.

Polis *lapse* terjadi karena beberapa hal diantaranya yang pertama yaitu terjadi karena pada satu tahun pertama pembayaran premi lanjutan tidak dilakukan sampai melewati batas tanggal jatuh tempo, dan yang kedua nilai investasi yang dimiliki tidak cukup membayar biaya polis. Maka kedua hal yang terjadi di atas strategi yang dilakukan tentang pencegahan polis *lapse* yaitu pada umumnya jika peserta mampu membayar premi secara rutin, tidak melakukan penarikan dan tidak terlambat membayar, maka polis akan tetap aktif.

Masalah kasus yang pernah terjadi di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung dimana perusahaan asuransi ini pernah menerapkan adanya kelompok orang yang bertugas untuk menjadi pengumpulan dana/agen kolektor pembayaran premi dari peserta/nasabah. Namun pernah mengalami masalah dimana salah seorang dari kelompok tersebut melakukan fraud (kecurangan) dengan tidak menyetorkan premi nasabah ke perusahaan, sehingga menyebabkan polis nasabah tersebut yang seharusnya aktif menjadi *lapse* karena hal tersebut. Penyediaan agen kolektor yang dibuat untuk meringankan dan memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran premi malah menimbulkan masalah baru. Untuk itu cara pembayaran premi tersebut dihilangkan. Serta pembayaran premi tidak lagi dilakukan oleh agen kolektor melainkan dilakukan dengan melibatkan lembaga keuangan lain. Lalu setelah kolektor dihilangkan ada pemberitahuan kepada pemegang polis mengenai batas pembayaran polis berupa sms, telepon ataupun chat via whats app serta melalui notifikasi pemberitahuan yang ada pada akun polis nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kepada nasabah terutama kepada nasabah yang sering sibuk, lupa, dan bahkan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk rutin membayar premi asuransinya tepat waktu. Sehingga, bisa menghindari terjadinya risiko polis *lapse* yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik

untuk mengambil judul “**Strategi Pencegahan Polis *Lapse* Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan Dalam Perspektif Islam, Studi Pada Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung**”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan di PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung?
2. Bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan di PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap asuransi syariah khususnya tentang polis *lapse*, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai

pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi perusahaan, membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam menangani masalah polis *lapse* yang dilakukan peserta, serta solusinya dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pesertanya.
3. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang asuransi syariah khususnya tentang polis *lapse* dan segala hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan polis *lapse* yang dilakukan perusahaan asuransi. Sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

H. Tinjauan Pustaka

Berikut ini penulis paparkan penelitian yang relevan dengan “Strategi Pencegahan Polis *Lapse* Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan dalam Perspektif Islam” berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama antara lain:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga Juni 2017 dengan judul jurnal “Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar dalam Asuransi Syariah” menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui penggunaan polis standar dalam praktik asuransi syariah. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang penggunaan polis standar dalam asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada sudut pandang analisisnya yang membahas tentang pengaturan standarisasi polis asuransi

syariah. Sedangkan, pada penelitian ini membahas strategi pencegahan polis lapse berdasarkan perspektif Islam.²⁵

Menurut penelitian yang dilakukan Achmad Gibran, Lindati Dwiatin, dan Siti Nurhasanah 2019 dengan judul jurnal “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Pembayaran Premi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa” menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan yakni pembayaran premi nasabah dengan menggunakan fasilitas *Auto Debet*, *Auto Debet* untuk PT. AXA Indoneesia bisa menggunakan rekening masing-masing nasabah membayar premi, akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kompensasi keterlambatan tersebut dan tergantung pada ketentuan yang diberlakukan masing-masing perusahaan asuransi.

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti apabila tertanggung yang menunggak membayar premi maka secara otomatis polis asuransi anda akan tidak aktif (*lapsed*), dan kebanyakan perusahaan asuransi tidak akan memberikan “*Notice of Cancellation*”. sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas cara pencegahan polis yang mengalami *lapse* berdasarkan tinjauan hukum Islam.²⁶

Menurut penelitian yang dilakukan Adyan Agit Pratama, Bambang Eko Turisno, dan Suradi Tahun 2017 dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing” menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan yaitu pemasaran asuransi melalui marketing adalah metode yang efektif dan menguntungkan saat ini.

²⁵ Lastuti Abubakar dan C.Sukmadilaga, Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah, *Jurnal Rechtidee*, No. 1,(2017), 107-103.

²⁶Gibran et al, “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.”

Perlindungan terhadap konsumen tetap terjamin sepanjang hak-hak konsumen terpenuhi dan tidak dilanggar oleh pelaku usaha di dalam perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memberlakukan dengan adanya ketentuan pasal 1338 KUHP perdata ini maka sudah menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yakni nasabah dan perusahaan asuransi untuk melaksanakan apa yang diatur di dalam buku polis apabila terjadi perselisihan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini carapenyelesaiannya jika terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung.²⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muh Mixan Kamjani Tahun 2017 dengan judul skripsi “Implementasi Penanganan Polis *Lapse*” menyimpulkan bahwa dampak yang diakibatkan dari adanya polis *lapse* di PT. Asuransi Takaful Surabaya terbagi atas dua, yaitu nasabah dan juga perusahaan asuransi. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang polis *lapse*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dimana penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian penanganan polis *lapse*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini membahas tentang strategi pencegahan yang dilakukan akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam di PT. Asuransi Prudential Bandar Lampung guna mengurangi polis *lapse*, dan pentingnya polis aktif bagi peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astika Purbasari tahun 2014 dengan judul skripsi “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Asuransi Yang Mengalami Polis *Lapse* Akibat Penggelapan Angsuran Premi Oleh Agen”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengguna jasa asuransi syariah yang

²⁷Diponegoro L A W Journal et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing,” *Diponegoro Law journal* 6 (2017): 1–13.

mengalami status polis *lapse*. Sedangkan perbedaannya adalah pada sudut pandang analisisnya, pada penelitian tersebut, pembahasannya lebih mengarah pada perlindungan konsumen yang mengalami polis *lapse*, sedangkan pada penelitian ini lebih pada prosedur strategi pencegahan polis *lapse* ditinjau dari perspektif Islam.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁸ Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental atau non eksperimental, interaktif dan non interaktif.²⁹

Penelitian dilakukan karena menemukan masalah, biasanya didapat dari hasil membaca (*Textbooks, Profesional, Journals*, laporan hasil penelitian, dan mengamati fenomena alam sosial).³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial yang menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia

²⁸Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 1.

²⁹Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: PT: Rajagrafindo Persada, 2019), 60.

³⁰Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 9.

sosialnya. Pada penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian. Penelitian di lapangan yang menggali data di lokasi penelitian Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.³¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam pada Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 185.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 42.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber atau responden. Pokok penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dengan cara langsung, wawancara dengan informan yang terlibat langsung. Data yang diinginkan oleh penulis yaitu untuk mencari data tentang polis *lapse* yang terjadi di Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai pegawai dan nasabah asuransi Prudential syariah Bandar Lampung.³³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini³⁴.

³³Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur Spss* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 37.

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵ Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subjek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 pegawai dari perusahaan asuransi Prudential syariah Bandar Lampung dan 682 nasabah asuransi Prudential syariah Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.³⁶ Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara *sample random sampling* dimana peneliti mengambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Teknik sampel nasabah yang digunakan *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja nasabah asuransi Prudential

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, 80.

syariah Bandar Lampung yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel dan cocok sebagai sumber data.³⁷ Sehingga dalam teknik accidental sampling ini peneliti mengambil responden pada saat itu juga di asuransi Prudential syariah Bandar Lampung dikarenakan tidak semua nasabah setiap hari datang ke kantor, karena hanya untuk keperluan yang penting saja mereka datang ke sana.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dengan alasan karena keterbatasan tenaga, waktu, dan juga dana sehingga penulis tidak dapat memperoleh sampel yang besar maka dalam penelitian ini diambil 7 sampel yang terdiri dari 3 anggota pegawai asuransi Prudential syariah Bandar Lampung dan 4 nasabah asuransi Prudential syariah Bandar Lampung sebagai sampel penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, memungkinkan peneliti mampu memahami tentang bagaimana strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam pada PT. Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.³⁸

117. ³⁷ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Renika Cipta, 2012), 12.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang peneliti sampaikan pertanyaannya.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode *interview*. Penelitian ini, dilakukan secara terbuka, dengan wawancara yang tidak dibatasi jawabannya. Pada penelitian ini metode Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data tentang faktor penyebab terjadinya polis *lapse* dan hal-hal yang terkait dengan strategi pencegahan polis *lapse* yang diterapkan oleh perusahaan serta, data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini. Penelitian ini ditujukan kepada manager, pegawai/karyawan, administrasi dan pembukuan, nasabah serta agen Asuransi Prudential Syariah Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi (kajian pustaka) adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil PT. Prudential Syariah Bandar Lampung, catatan hasil wawancara, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.⁴⁰

³⁹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 178.

⁴⁰Juliansyah, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 23.

6. Metode Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dan diolah menggunakan penelitian deskriptif analisis. Secara rinci peneliti menerangkan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansi dalam penelitian.⁴¹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

b. Organizing

Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.⁴² Peneliti melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

c. Analyzing

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke yang umum. Dengan memberikan analisa lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

⁴¹ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

⁴² *Ibid*, 245.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan itu sehingga, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.⁴³

7. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penyampaian penelitian dilakukan dengan penelitian induktif, penyampaian induktif yaitu mencoba memahami situasi tersebut menampilkan diri tanpa adanya dugaan-dugaan. Metode induktif berdasarkan fakta-fakta di lapangan diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dianalisis menjadi satu kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Tujuan dari metode ini yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau suatu peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus generalisasinya yang bersifat umum yaitu tentang bagaimana strategi pencegahan yang digunakan dan diterapkan oleh asuransi Prudential syariah Bandar Lampung dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko polis *lapse* akibat keterlambatan dalam pembayaran premi lanjutan yang ada di asuransi Prudential syariah Bandar Lampung.

⁴³ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 137.

⁴⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Peneliti menggunakan teknik induktif karena penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini, setelah peneliti mendapatkan data, data tersebut kemudian diolah dalam bentuk uraian-uraian setelah itu data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara induktif, yang berangkat dari informasi tentang strategi pencegahan polis *lapse* akibat keterlambatan pembayaran premi lanjutan dalam perspektif Islam. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan pengamatan dan menganalisis kemudian disimpulkan.⁴⁵



⁴⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 80.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Pencegahan

1. Pengertian Strategi

Secara harfiah “strategi” dapat diartikan sebagai seni (art) dalam melaksanakan strategi yaitu siasat atau rencana, sedangkan menurut Reber, mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Menurut saiful Bahri Djamarah, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode. Menurut Hamel dan Prahalad menyatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incramental* (bertambah) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.⁴⁶ Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.⁴⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.⁴⁸

⁴⁶ Maisarah Leli, Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Islam, *Jurnal At-Tasyari'iy*, No. 1 (2019), 27-43.

⁴⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 16.

⁴⁸ Junaidah, “Strategi Pembelajaran Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal PendidikanIslam*6,no.1(2015):120,<https://media.neliti.com/media/publications/57095-ID-strategi-pembelajaran-dalam-perspektif-i.pdf>.

2. Pengertian Strategi Pencegahan

Pencegahan merupakan sebagai upaya manajemen sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau hal-hal yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang. Dalam konteks hal ini, dapat dilakukan dengan cara mengelola (*management*) suatu cara atau mengidentifikasi serta pengendalian yang gunanya untuk mengurangi risiko tersebut.⁴⁹ Mencegah adalah melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul serta dapat diatasi atau dihindari. Dalam kenyataannya, usaha pencegahan tersebut tidak selamanya selalu berhasil.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan, bahwa strategi pencegahan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam upaya mencegah maupun mengantisipasi sesuatu sebelum terjadi, dengan tujuan mencegah kerugian-kerugian akibat terjadinya suatu hal atau risiko yang tidak diinginkan dengan cara meminimalisir risiko yang mungkin saja terjadi.

B. Asuransi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman* lahu atau *musta'min*. *At-tamin* diambil dari kata yang memiliki makna arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling

⁴⁹ Hermein Nugraheni, *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya* (Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2018), 99.

⁵⁰ Yudhi Setiawan, Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Di Dalam Pembayaran Klaim Pada Asuransi Jiwa, *Jurnal Ganec Swara*, No. 2 (2018), 122-130.

menanggung. Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang terjadi di dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya.⁵¹

⁵² Menegaskan bahwa konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pukul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung resiko.

Asuransi menurut undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya yang telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵³

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau (perikatan) yang sesuai dengan

⁵¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 378.

⁵²Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*.

⁵³“Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian” (n.d.).

syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi, sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana peserta saling menanggung.⁵⁴

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an. Tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'amin*" ataupun "*al-takaful*" namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat tersebut antara lain:

a. Al- Qur'an

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59): 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۭ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),

⁵⁴Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Ed. 5. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 32.

dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁵

Pada penjelasan dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik.

Perintah Allah SWT untuk berusaha untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'ad: 11

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia”.

Ayat di atas memuat kita perintah yaitu berusaha untuk meminimalisir-risiko yang kemungkinan akan terjadi di dalam hidupnya.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil AL-Qur'an, 2007), 78.

b. Hadis

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَابَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat”.*

Hadis ini mengandung makna seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan terbaik untuknya.⁵⁶

c. Ijtihad (Fatwa Sahabat)

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau berkata, “orang-orang yang tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar

⁵⁶Rachmat Syafe’i, *Hadits: Aqidah, Akhlak, Sosial, Dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 253.

secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁵⁷

Berdasarkan landasan hukum asuransi di atas fungsinya yaitu supaya ketentuan-ketentuan asuransi yang dijalankan sesuai dengan ajaran hukum islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dan juga tidak menyimpang dari hukum Islam yang berlaku.

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu ala al birri wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'amin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* (tolong-menolong).⁵⁸

Keberadaan asuransi syariah pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi syariah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh nasabahnya untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akta perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan akad penjaminan risiko asuransi syariah memiliki beberapa prinsip antara lain:⁵⁹

⁵⁷Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Ed. 1. (Jakarta: Kencana, 2005), 242.

⁵⁸Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 132.

⁵⁹Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 118.

a. Bekerja sama untuk saling membantu

Lembaga asuransi syariah hendaknya dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerja sama, perusahaan asuransi syariah tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah.

b. Saling tanggung jawab

Peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata ketika masing-masing terikat kesepakatan yang di fasilitasi perusahaan asuransi syariah.

c. Saling melindungi dalam segala kesusahaan

Kesusahaan atau penderitaan yang diakibatkan oleh musibah yang menimpa supaya tidak dibiarkan berlarut-larut, maka disadarkan masing-masing pihak untuk saling melindungi, bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

d. Terhindar dari *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba*

Asuransi syariah yaitu dalam pelaksanaannya pada premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan menjadi dana sosial (akad *tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang mengalami musibah, menjadikan asuransi terhindar dari prinsip dasar operasional

asuransi konvensional yaitu terdapatnya unsur *maisir, gharar, dan riba*.

4. Akad Tijari dan Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Islam

a. Akad Tijari/Tijarah

Akad tijari adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*Shaibul Maal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diadakan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Dana yang diperoleh dari peserta/nasabah berupa premi bukan sebagai pendapatan perusahaan, melainkan merupakan amanah yang harus dikelola dengan metode mu'amalah syariah.⁶⁰ Sebagai administrator perusahaan berhak mendapatkan *management fee*. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang terkumpul perusahaan aka menginvestasikannya pada mitra-mitra bisnis yang telah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini perusahaan hanya berhak mendapatkan fee atau bagi hasil berdasarkan akad-akad tijari yang dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk kepentingan komersial dan mencari keuntungan yang bersifat *profit oriented*.⁶¹ Adapun akad-akad tijari yang dipakai oleh perusahaan asuransi syariah, antara lain: Akad *Mudharabah* (*Mudharabah Musytarakah*), *Wakalah* (*Wakalah bil Ujrah*), dan *Akad Musyarakah*. PMK menyebutkan bahwa akad *Mudharabah*, wajib memuat sekurang-kurangnya:

⁶⁰Junaidi Abdullah, Akad-Akad di Dalam Asuransi Syariah, *Journal of Sharia Economic*, No. 1, (2018), 11-23.

⁶¹Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 98.

- 1) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shaibul maal* (pemilik dana).
- 2) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan, dan
- 4) Bagi hasil (*nisbah*), cara dan waktu pembagian investasi.

Apabila akad tijari yang dilakukan oleh perusahaan dan peserta asuransi adalah akad *Mudharabah Musytarakah* maka PMK menentukan, bahwa dalam akad tersebut, wajib memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shaibul maal* (pemilik dana).
- 2) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Batasan dan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.
- 4) Cara dan waktu penentuan besar kekayaan perusahaan dan kekayaan peserta.

Pemegang polis yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad tijari yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola *danatabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Ujah berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi biaya/ujrah dalam pengelolaan dana *tabarru'* meliputi kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya dana penarikan investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.⁶²

Setiap polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah menggunakan akad-akad tersebut, namun yang berlaku saat ini tidak seluruh perusahaan mencantumkan akad-akad tijari dalam polis mereka.

b. Akad Tabarru'

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana/atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menganut resiko, konsep asuransi syariah menganut prinsip berbagi resiko. Dalam asuransi inilah konsep saling tolong-menolong yang diformulasikan dalam

⁶²Destri Budi Nugraheni, Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2, (2016), 216-231.

bentuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta atau dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah atau sedekah.⁶³

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'ayatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, kebajikan, dan derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁶⁴

Tabarru' yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena megharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak mencari “*return*” ataupun motif akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn* dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang mengangkat *non profit transaction* (transaksi riba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁶⁵

Fungsi akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis, jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk

⁶³ Jamal Ibrahim Mustafa, “Prinsip *Tabarru'* Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah” 8, no. 2 (2016): 400–411.

⁶⁴ M. Arif Hakim, “Analisis Aplikasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 231.

⁶⁵ Nugraheni, “Analisis Yuridis Akad *Tabarru'* Dan Akad *Tijarah* Dalam Produk Unit Link Syariah.”

tujuan-tujuan komersil. Asuransi sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk di asuransi syariah. Pada akad *tabarru'* menyebutkan sekurang-kurangnya tiga hal berikut:⁶⁶

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- 3) Cara dan waktu pembayaran dan klaim
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Untuk pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti DSN MUI, diantaranya:

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus berpisah dari dana lainnya
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad

⁶⁶Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 68.

mudharabah atau *mudharabah musyarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.⁶⁷

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil optimal. Dalam asuransi syariah mengelola dana harus sesuai dengan syariah islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*.

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana (premi) peserta adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban *danatabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dari dana *tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

Dalam sistem operasional akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum

⁶⁷(Nursalam, and Fallis 2016)

Islam, artinya akad yang digunakan harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba*.

1) Menghindari ketidakjelasan (*gharar*)

Hadits nabi Muhammad SAW, Yang dapat menjadi acuan mengenai *gharar* adalah: “*Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan lemparan batu (hasab) dan jual beli gharar (diriwayatkan Imam Muslim)*. Definisi *gharar* menurut Imam Syafii adalah apa-apa yang akibatnya yang tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah apa yang paling kita takuti. Menurut Ibnu Qayyim *gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.

2) Menghindari perjudian (*Maisir*)

Kata *maisir* berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Hal ini biasa juga disebut perjudian, yang dalam agama dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memperoleh kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Gemala Dewi juga mengartikan bahwa dalam konsep *maisir* disuatu pihak memperoleh keuntungan, tetapi dilain pihak justru mengalami kerugian. Unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian, tertanggung tidak mengalami musibah atau kecelakaan maka tertanggung tidak berhak mendapat apa-apa termasuk premi yang disetornya.

3) Menghindari bunga (Riba)

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*annumuw*), meningkat (*al-irifa*), dan membesar (*al-uluw*), jadi, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menagguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks akad pada asuransi syariah tujuan dari akad *tabarru* adalah untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas dan untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami risiko kerugian ataupun mendapatkan musibah. Pelaksanaan akad pada asuransi harus sesuai dengan syariat islam dan terhindar aktivitas kegiatan yang bersifat *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba*.

C. Polis Asuransi

Surat perjanjian antara para pihak dalam asuransi disebut polis. Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi/pengelola dan pemegang polis yang sertifikat polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan sesuai atau pertanggungan. Dalam asuransi syariah, pihak dalam perjanjian tidak disebutkan penanggung dan tertanggung, namun perusahaan dan pemegang polis. Pemegang polis adalah seseorang atau lembaga/badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan sebagai pengelola (Pasal 1 Istilah dan Syarat-Syarat Umum

⁶⁸Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, 136.

Polis).Pemegang polis dapat sekaligus sebagai peserta, namun dimungkinkan pemegang polis bukanlah peserta asuransi.⁶⁹

Peserta adalah seseorang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau dengan kata lain ia adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan berdasarkan polis asuransi. Peserta dibagi menjadi peserta utama dan peserta tambahan. Apabila pemegang polis bukanlah peserta, maka peserta yang tercantum dalam polis hanyalah peserta utama, sedangkan apabila pemegang polis adalah peserta pula, maka ia dimasukkan sebagai peserta tambahan. Polis asuransi yang pembayaran preminya dilakukan secara bulanan rentan mengalami *lapse*. Hal ini disebabkan pemegang polisnya lupa, sibuk atau bahkan sedang kesulitan dalam keuangan. Polis lapse yaitu polis yang tidak aktif akibat tidak dibayarkannya premi pada saat jatuh tempo pembayaran.⁷⁰

Menurut pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk

⁶⁹Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215.

⁷⁰Agus Wasita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 1 (2020): 105–113.

memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.⁷¹

Pasal 255 KUHD menegaskan bahwa pertanggungan atau asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan pihak asuransinya. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam polis asuransi dalam pertanggungan karena merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, yang besarnya premi yang harus dibayar ditentukan oleh presentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh penanggung. Pemegang polis dalam hal ini adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan jiwa atau penanggung.⁷²

Polis asuransi sebagai alat bukti tertulis, maka isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Pasal 256 KUH Dagang, menyatakan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat sebagai berikut:⁷³

- a. Hari ditutupnya pertanggungan.
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.

⁷¹Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi."

⁷²Liana Gunawan Wilatikta, "Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa," *Hukum Asuransi* 6 (2017): 5–9.

⁷³Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (Bandung: Alumni, 2013), 20.

- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Saat pada mana bahaya berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Premi pertanggungan tersebut, dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Apabila terjadi laporan klaim, penanggung dapat melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut untuk mengetahuinya yaitu:

- a. Keabsahan (*legitimasi*) polis yaitu bahwa:
 - 1) Polis bersangkutan telah dikeluarkan dengan benar.
 - 2) Tidak ada hal yang membatalkan polis, misalnya tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 3) Tidak ada pelanggaran kondisi polis atau *warranty* yang menyebabkan polis tidak berlaku (batal dengan sendirinya).
- b. Masa berlaku atau waktu polis masih berjalan.

Jika hasil temuan adalah polis tersebut tidak sah atau masa berlaku polis telah berakhir, maka klaim segera ditutup dengan pemberitahuan kepada tertanggung. Jika hasil temuan polis tersebut sah maka dilakukan tindakan berikutnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh tertanggung yang mengalami musibah adalah menjelaskan serta membantu semaksimal mungkin. Selanjutnya, tertanggung harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah melihat keabsahan

polis data lengkap serta dokumen-dokumen yang diperlukan, proses klaim akan segera diselesaikan oleh pihak asuransi⁷⁴.

Polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Hal ini disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Pasal 7 maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Syariah. *pengertian tabarru'* sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Salah satu akad *tijarah* dan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. *Ujrah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis.⁷⁵

Pada penjelasan ini, maksud dan tujuan dari adanya polis asuransi ini sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada penanggung, dimana kerugian tersebut tertulis dalam polis, serta menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.

⁷⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 45.

⁷⁵ Fakultas Hukum et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujarah Produk Unit Link Syariah," *jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2018).

D. Premi Asuransi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan diterima oleh penanggung sebagai pengganti suatu kerusakan, kerugian maupun apabila terjadi kehilangan tertanggung kepada penanggung. Jumlah seberapa besar premi dapat ditentukan dari seleksi resiko yang dihasilkan oleh *underwriter* maupun apabila perusahaan telah menyeleksi resiko atas permintaan calon tertanggung sehingga calon tertanggung membayar premi asuransi sesuai tingkat risiko berdasarkan kondisinya masing-masing. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan tertanggung.⁷⁶

Premi asuransi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar terlebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku setelah premi dibayarkan. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai nilai satu tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain masyarakat yang mengalami kerugian, oleh itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya.⁷⁷

Pendapatan premi merupakan sejumlah uang yang diterima perusahaan asuransi dari pemegang polis sehubungan dari perjanjian pertanggungan polis asuransi yang dilakukan. Premi merupakan hadiah atau derma yang diberikan ataupun

⁷⁶Wanda Agustiranda, Yuliani, and W Bakar Samadi, "Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, Dan Isk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* XIV, no. No1 April (2019): 1–12, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/article/view/9220/pdf>.

⁷⁷Faiqotul Nur Assyifah Ainul, Jeni Susyanti, and Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6, no. 02 (2017): 97–110, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/136>.

merupakan sesuatu pembayaran tambahan selain pembayaran normal. Premi adalah harga yang dibayar pemegang polis untuk mendapatkan pembayaran asuransi, jumlah pembayaran ditentukan dalam polis. Premi yang diterima diinvestasikan sampai dan jika pemegang polis mengajukan klaim atas seluruh jumlah atau sebagian jumlah tertera pada polis, dan klaim tersebut sah. Untuk sejumlah lini bisnis perusahaan akan tahu dengan segera bahwa perusahaan telah menanggung kewajiban dari polis yang dikeluarkannya, kapan klaim tersebut harus dibayar, walaupun jumlah klaim tidak diketahui pada saat tersebut.⁷⁸

Pada asuransi, premi mempunyai suatu nilai tanggungan untuk nilai tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Premi berbentuk pembayaran sewa dengan satuan uang yang diartikan satu harga yang dibayar cukup untuk resiko. Kecukupan dihitung dengan anggaran penanggung asuransi berdasarkan rata-rata resiko dari berbagai pengalaman resiko yang sama. Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola.⁷⁹

Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya resiko dan jumlah pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadi resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadi kerugian

⁷⁸ Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009), 65.

⁷⁹ Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, 311.

kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka pembayaran tergantung pada perjanjian dalam polis. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan.⁸⁰

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu:⁸¹

a. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar (sejumlah uang) premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda:

- 1) Rekening *tabarru'* adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong-menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.
 - 2) Rekening tabungan peserta adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- b. Sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan dibayarkan bila peserta sudah meninggal, perjanjian akan berakhir (jika ada *surplus* dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat

⁸⁰Budisantoso dan Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 183.

⁸¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 70.

islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.⁸²

Tarif biasanya ditetapkan dalam persentase (%) atau permil. Tarif premi yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Tarif premi asuransi berdasarkan buku tarif, artinya tarif premi asuransi yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang sewaktu-waktu dapat berubah. Tarif ini berlaku bagi semua anggota maskapai-maskapai asuransi.
- b. Tarif premi asuransi yang ditetapkan oleh maskapai asuransi sendiri, biasa disebut dengan istilah non-tarif.

Pembagian premi atau kontribusi peserta dalam asuransi syariah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Premi biaya yang digunakan untuk ujah perusahaan.
- b. Premi *tabarru'* digunakan untuk mengganti kerugian atas terjadinya musibah dengan mengajukan klaim.
- c. Premi tabungan merupakan dana milik peserta yang dititipkan kepada perusahaan dan dibayarkan diakhir perjanjian.

Pada takaful umum premi takaful dibayarkan sekaligus pada awal priode perjanjian untuk jangka waktu satu tahun dan harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang. Jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan yang dihitung sesuai dengan resiko jenis takaful yang dipilih kontribusi atau premi takaful yang dibayarkan peserta dimasukan dalam kumpulan uang peserta yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan

⁸²Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, 177.

untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya. Pembayaran premi oleh pihak bertanggung dan pengeluaran polis oleh pihak penanggung merupakan pelaksanaan bentuk kontrak oleh kedua belah pihak. Jika penanggung gagal untuk mengeluarkan polis setelah menerima premi, hal ini dikatakan sebagai pelanggaran kontrak.⁸³

Pembayaran premi dengan secara angsuran, maka sejak pembayaran angsuran pertama, polis sudah mengikat kedua belah pihak. Persetujuan pembayaran premi secara angsuran harus secara tegas dinyatakan dalam polis atau ada persetujuan tertulis dari penanggung. Sehubungan dengan hal tersebut, cabang harus benar-benar memperhatikan pembayaran oleh *customer debitur* atas asuransi barang agunan sesuai perjanjian.

premi dalam kontrak asuransi menunjukan bagian pihak bertanggung dalam pelaksanaan kontrak. Apabila pihak bertanggung tidak dapat menyelesaikan premi tepat pada waktunya atau tidak dapat meneruskan pembayaran regulernya, maka pada umumnya premi yang telah dibayarkan tidak hilang karena tidak dibayarnya premi yang telah disepakati. Premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang jelas porsinya, yaitu tabungan dan derma. Bagian tabungan ini akan menjadi milik peserta dan akhirnya akan dikembalikan kepada peserta. sedangkan bagian derma dari awal perserikatan sudah diikrarkan untuk tujuan itu. Adapun hak dari setiap peserta adalah akan menerima derma dari peserta lainnya sejumlah tertentu apabila suatu musibah menimpa seorang peserta. selain itu perlu ditambah ketentuan mengenai bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi atau bertanggung dari pihak penanggung atas investasi yang dilakukan.⁸⁴

⁸³ Moh Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010), 257.

⁸⁴ Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, 657.

Premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dan para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu yang relatif lama, akan membentuk dana yang cukup besar, dan dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu sebagai berikut:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian.
- b. Menghindari tertanggung dari kebangkrutan dari sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian.

Sedang bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena premi yang harus dibayar adalah unsur biaya baginya, yang akan mampu mempengaruhi kegiatan/tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya premi pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup risiko asuransi atau tidak. Pada penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi baik penanggung maupun tertanggung, untuk peserta/tertanggung sendiri adalah untuk mendapatkan jaminan perlindungan risiko buruk yang bisa dialami kapan pun. Perlindungan ini kemudian diperoleh dengan cara membayar premi asuransi yang sekaligus agar mendapatkan manfaat asuransi tersebut.

E. Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Dalam asuransi premi diibaratkan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh pemegang polis untuk mendapatkan proteksi yang telah

diperjanjikan oleh perusahaan asuransi. Peran premi dalam setiap perusahaan asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah sangat penting karena premi merupakan suatu kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Pembayaran asuransi jiwa merupakan hal pokok yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi, yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Salah satu masalah yang banyak terjadi pada kegiatan asuransi saat ini adalah nasabah terlambat melakukan pembayaran premi. Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung risiko mempunyai ketentuan masing-masing dalam menentukan waktu jatuh tempo pembayaran premi dan kelonggaran waktu keterlambatan pembayaran premi.

Salah satu faktor klaim ditolak oleh pihak penanggung adalah sering terlambat melakukan pembayaran premi yang seharusnya dibayarkan tepat waktu secara rutin. Keterlambatan pembayaran premi dapat dilihat dari tanggal jatuh tempo (*grace period*) nasabah, apabila nasabah melakukan pembayaran premi lewat jangka waktu 1 bulan maka secara otomatis polis asuransi akan dibatalkan (*lapse*). Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.⁸⁵

F. Manajemen Risiko Asuransi

Pengertian Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dikemudian hari pada lembaga jasa keuangan non-bank. Sedangkan manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

⁸⁵ Dwi Novita Anggraini and Ova Novi Irama, "Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Kesawan"

pengarahan dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran islam.⁸⁶

Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan/kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Islam manajemen risiko selalu dimulai dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, karena dalam segala hal pada kehidupan tidak dapat dipisahkan dari agama. Dalam sudut pandang Al-Qur'an, Islam mendukung semua upaya memperkecil risiko sekaligus menunjukkan bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Konsep ketidakpastian dalam Islam menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen risiko Islami. Secara natural, Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan digunakan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang akan terjadi dengan bergantung pada konsep yang ada. Berikut adalah proses-proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dan telah diatur pada Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015:

a. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank melakukan identifikasi risiko terhadap strategi yang disusun oleh masing-masing divisi, memiliki metode tersendiri dalam mengidentifikasi risiko pada setiap produk.

⁸⁶Wahyu Rofikah and Dina Fitriisa Septiarini, "Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 901.

b. Pengukuran risiko

Setelah melakukan proses identifikasi risiko, proses selanjutnya adalah pengukuran risiko guna mengestimasi kemungkinan muncul dan dampaknya risiko tersebut, pengukuran ini dilakukan dua kali dalam setahun, yang diukur adalah pengaruh dan aktivitas produk yang akan menimbulkan risiko.

c. Pemantauan risiko

Dari proses pengukuran risiko, perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) melakukan proses pemantauan risiko. Tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dari hasil yang diharapkan. Pemantauan ini dilakukan dengan memperhatikan kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif pada perusahaan.

d. Pengendalian risiko

Proses terakhir yang dilakukan oleh Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) adalah pengendalian risiko. Proses ini memiliki empat jenis pengendalian sebagai bahan pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya risiko, yaitu menghindari risiko (*risk avoidance*), mitigasi risiko (*risk reduction*), transfer risiko pada pihak ketiga (*risk sharing*), dan menerima risiko (*risk acceptance*).⁸⁷

Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

⁸⁷*Ibid.*

a. Risiko murni

Risiko murni bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak, apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi di pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini.

b. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek. Fluktuasi harga saham dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan..

c. Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi menjadi 3 risiko, yaitu:

1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik dan kehilangan pekerjaan.

2) Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki sesuatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau dirusak. Hilangnya harta berarti kerugian finansial.

3) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

Tujuan yang ingin hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaiki keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko antara lain:⁸⁸

- a. Untuk kelengkapan hidup perusahaan (*survival*)
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi
- d. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- e. Menstabilisasi pendapatan (premi) perusahaan
- f. Memperkecil biaya (*least cost*)
- g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan atau nasabah

Pada penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen risiko asuransi adalah untuk nasabah asuransi

⁸⁸ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 201.

dengan pengendalian risiko ke asuransi ini ada perubahan atau pertukaran ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko, menjadi adanya kepastian bahwa dengan anggaran premi asuransi yang pasti, sudah dapat diprediksi penggantian dari asuransi apabila benar-benar terjadi risiko yang berada dalam aturan-aturan ketentuan polis asuransi.

G. Tolong-Menolong Dalam Islam

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI /X/2001 tentang pedoman asuransi syariah dinyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar*. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran Islam.⁸⁹

Akad *tabarru'* dalam asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Dengan demikian asuransi syariah berbasis *tabarru'* digagas untuk menjawab pertanyaan di atas. Konsep muamalah berbasis *tabarru'* adalah ibadah. Sehingga akadnya

⁸⁹Dwi Fidhayanti, Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 1 (2012), 12-23.

dikategorikan sebagai *non-profit oriented*. Dengan demikian, apabila melihat dari aspek ini saja maka tidak ada sesuatupun yang perlu diperdebatkan mengenai keabsahannya. Prinsip *tabarru'* adalah bentuk muamalah yang berorientasi kebajikan, sehingga bisa dipastikan semua ulama tidak mempersoalkan aspek ini. Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Hal ini sesuai firman Allah SWT berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah:2).⁹⁰

Konsep dasar dari asuransi syariah adalah membagikan risiko yang proporsional adil diantara para peserta yang secara relatif homogen, dengan dasar ini diharapkan di dalam asuransi syariah para peserta tolong-menolong dengan peserta lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, sehingga semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak menisyratkan imbalan ataupun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun, demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-partnya* untuk sekedar

⁹⁰ Departemen Agama Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Abadi, 2012).

menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Setiap peserta dalam asuransi syariah sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu lainnya, sesuai keputusan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. Upaya tersebut dikoordinir oleh pengelola, dalam hal ini PT asuransi, dengan memisahkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut (premi) *tabarru'*. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara peserta apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana/*tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.⁹¹ Dasar hukum akad *tabarru'* di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada fatwa Nomor 53/DSN/-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Akad *tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya:

1. Kesepakatan peserta untuk saling menolong (*ta'awun*).
2. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
3. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok.
4. Cara dan bayar waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim.
5. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi dalam pembatalan oleh peserta.
6. Ketentuan lain mengenai alternatif dan presentase pembagian surplus underwriting.

⁹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 36.

7. Ketentuan lain yang disepakati.

Pengelolaan dana *tabarru'* dilakukan oleh suatu lembaga menjadi pemegang amanah dimana lembaga tersebut sudah melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. selain itu, dalam pengelolaan dana *tabarru'* pembukuannya pun terpisah dari dana yang lain. Dana *tabarru'* kemudian di investasikan dan hasil dari investasi tersebut kemudian menjadi hak kolektif peserta dan masuk dalam rekening *tabarru'*. Surplus underwriting yang terdapat pada dana *tabarru'* kemudian dimasukkan ke dalam akun *tabarru'* atau diberikan kepada peserta yang mengalami musibah atau peserta yang pasif dalam pembayaran preminya.⁹²



⁹²Amalia Fadilah dan Makhrus, Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 (2019), 87-103.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- AbdulKadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdullah Amrin. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Agustiranda, Wanda, Yuliani, and W Bakar Samadi. "Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, Dan Isk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* XIV, no.No1April(2019):1–12.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/article/view/9220/pdf>.
- Ahmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Ainul, Faiqotul Nur Assyifah, Jeni Susyanti, and Ronny Malavia Mardani. "Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia." *Jurnal IlmiahRisetManajemen*6,no.02(2017):97–110.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/136>.
- AL-Mashrof, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, No.1, (2020).
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anggraini, Dwi Novita, and M.Ak Ova Novi Irama, SE. "Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Cabang Kesawan." *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 1, no. 1(2019):31–40.
<http://jurnal->

lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JAAPI/article/view/302.

Budisantoso dan Triandaru. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Burhanuddin, S. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia” (2013): 97–106.

Burhanudin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Gibran et al. “Akibat Hukum Tentang Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.” *Pactum Law journal* 2, no. 02 (2019): 606–618.

Hakim, M. Arif. “Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 231.

Hermein Nugraheni. *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*. Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2018.

Hukum, Fakultas, Universitas Gadjah, Mada Jl, Socio Justicia, No Bulaksumur, and Sleman Yogyakarta. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah.” *jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2018).

Husein Umar. *Strategi Manajemen In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswanto Dwi Warno, Joko Setiyono, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing." *Diponegoro Law journal* 6 (2017): 1–13.

Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Junaidah. "Strategi Pembelajaran Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2015): 120.
<https://media.neliti.com/media/publications/57095-ID-strategi-pembelajaran-dalam-perspektif-i.pdf>.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Kredit, Mendapatkan, Pada Perusahaan, and Abdul Tayib. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi." *Unizar Law Review* 2, no. 1 (2019).

Lastuti AbuBakar, C. Sukmadilaga. "Implementasi Kepatuhan Terhadap Priinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Man Suparman Sastrawidjaya. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2013.

Moh Ma'sum Billah. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Muslehuddin. *Asuransi Dalam Islam*. Ed. 5. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Mustafa, Jamal Ibrahim. "Prinsip Tabarru' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah" 8, no. 2 (2016): 400–411.

Nasution, Nurul Hidayati, and Satria Tri Nanda. "PENGARUH

PENDAPATAN PREMI , HASIL UNDERWRITING ,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 41–55.

Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Yuridis Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215.

Nursalam, 2016, metode penelitian, and A.G Fallis. “Manajemen Risiko Dana Tabarru.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Patriana, Ella. “Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Syariah Dalam Hubungannya Dengan Segmentasi Pasar Dan Laba Perusahaan.” *Ekonomi* 13, no. 2 (2015): 176–189.

Priscilia, Ineke Vanessa, and Universitas Narotama Surabaya. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Uupkdrt Serta Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi.” *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (n.d.): 153–162.

PT. Prudential Life Assurance. *PRUfast Start*. Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2017.

Purnomo, Agus. “Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah.” *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 27.

Rachmat Syafe’i. *Hadits: Aqidah, Akhlak, Sosial, Dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Ramadhani, Herry. “Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Al-Tijary* 1, no. 1 (2015): 57–66.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil AL-Qur’an, 2007.

Rivai dan Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009.

- Rofikah, Wahyu, and Dina Fitriasia Septiarini. "Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 901.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Santi, Mei. "Penerapan Asuransi Syariah Unit Link Di Indonesia." 3 *Eksyar* 5, no. 1 (2018): 28–39.
- Sarwono. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur Spss*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Setiawati, Neneng Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi." *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 150.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. Depok: PT: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Thamrin, Dewi Sari Indah dan Taqwan. "Sistem Pendukung Keputusan Berbasis AHP Untuk Membantu Penentuan Pengisian Jabatan Di Bandar Lampung Study Kasus: Prudential Life Assurance." *Manajemen Informasi Dan Teknologi* (n.d.): 11–19.
- Triana, Mei. "Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan

Bermotor Pada Pt. Asuransi Raya Cabang Medan.” *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 1–18.

Waldi Nopriansyah. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Wasita, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 2, no. 1 (2020): 105–113.

Wilatikta, Liana Gunawan. “Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.” *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2015): 54–67.

———. “Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.” *Hukum Asuransi* 6 (2017): 5–9.

Wirdyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2005.

Departemen Agama Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lentera Abadi, 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah, n.d.

PT. Prudential Life Assurance, PRUfast, n.d.

“Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian” (n.d.).